

STUDI KEMASYARAKATAN PENANGANAN KORBAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI JEMBER 2006

Soedarso

Abstract

This article is the report of the research result. The research aims to know how strategy of adaptation was carried out by the victim of disaster of torrent and landslide in Jember, early January 2006. The research methodology used are observation and non-structured interview under researcher guidance. The data taken in July 2007 where the disaster takes place, that is in Subdistrict Panti, Jember.

A period of emergency, safe disaster victims live in the evacuation tents during 6 month, before they are evacuated in the aid house which have been built by local government. Housing is built under hilly area in which another disaster can emerge, therefore, it requires further attention. A period of recovery still continues until now. The victims have not been able to forget yet about what happens to them. They are still trauma of losing anything, and importantly of feeling scare. They remain expect attention and assistance from the government and related parties.

Keywords: *research, society, disaster, attention, government*

Bencana dapat bersifat bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana buatan akibat tindakan manusia (*man made disaster*). Antara bencana alam dan bencana buatan meskipun seolah mudah dibedakan, namun terkadang juga menjadi sulit dibedakan. Bencana alam yang betul-betul bersiat alam tanpa campur tangan manusia misalnya badai, angin ribut, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan seterusnya. Banyak pula bencana alam namun terkait dengan perbuatan manusia misalnya banjir bandang dan tanah longsor yakni akibat penebangan hutan secara besar-besaran. Bencana yang betul-betul buatan misalnya pencemaran udara, air dan tanah akibat pola hidup modern, bencana industri, dan sebagainya.

Jika suatu bencana telah terjadi, dalam hal ini bencana banjir bandang dan tanah longsor di Jember awal tahun 2006, maka yang harus dilakukan adalah pemulihan (*recovery*) ke keadaan semula. Dalam hal ini permasalahan-permasalahan fisik dan sosial merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan, sehingga dalam jangka panjang idealnya *recovery* juga bermakna *mitigation* (pengurangan resiko

bencana) bukan sebaliknya menambahkan ancaman resiko bencana baru yang lebih besar.

Tulisan ini bermaksud memaparkan hasil penelitian terhadap keadaan fisik dan social pascabencana yakni sejauhmana situasi dan keadaan masyarakat korban bencana di kecamatan Panti, Jember awal 2006; bagaimana detail keadaan dan kekuatan social masyarakat pascabencana. Bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Panti Kabupaten Jember tergolong besar dari segi jumlah korban dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya.

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat korban bencana dengan mengadakan pengamatan dan interview mendalam guna memperoleh data kualitatif data data kuantitatif yang diperlukan. Penelitian dilakukan kurang lebih setahun setelah bencana terjadi. Data yang diperoleh bersifat primer dan sekunder. Data primer berupa hasil pengamatan dan interview terhadap korban bencana, sedangkan data sekunder berupa data-data atau informasi dari berbagai pihak lain seperti Pemda, LSM, maupun media masa.

Deskripsi Wilayah Jember

Wilayah Jember merupakan ngarai subur pada bagian tengah dan selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan timur. Wilayah selatan berhadapan dengan samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah utara dengan Kabupaten Bondowoso dan Probolinggo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Luas wilayah kabupaten Jember adalah 3.293, 34 Km², terletak pada: 60.27'9'' s/d 70.14'33'' Bujur Timur dan 70.59'6'' s/d 80. 33'56'' Lintang Selatan.

Rata-rata curah hujan berkisar antara 1.600 mm/tahun sampai 3.000 mm/tahun. Wilayah Jember rata-rata mendapat pengaruh angin Muson sehingga pada bulan Mei s.d. pertengahan Oktober adalah bulan-bulan kering, sedangkan Nopember s.d. pertengahan April merupakan bulan-bulan basah.

Jumlah penduduk berdasar registrasi akhir tahun 1999 adalah 2.106.632 jiwa, dengan sex ratio sebesar 95,16 % yang artinya jumlah penduduk perempuan 4,84 % lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk rata-rata 829,96 jiwa / Km². Pertanian masih menjadi pekerjaan dominan masyarakat sekaligus sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara kotor menyokong 50,32% PAD. Pendapatan perkapita rata-rata penduduk tahun 1999 sebesar 2.001.820 rupiah. Dengan demikian rata-rata masyarakat Jember memang memiliki keterikatan kuat dengan alam.

Secara administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan dengan jumlah desa / kelurahan sebanyak 221 desa dan 23 kelurahan. Semua desa di Kabupaten Jember telah terklasifikasi sebagai desa swasembada tanpa adanya status desa swakarya, dengan kategori 86 desa swadaya II dan selebihnya adalah kategori swadaya III.

Peristiwa Banjir dan Tanah Longsor

Banjir bandang disertai lumpur (tanah longsor) utamanya terjadi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Kemiri. Terjadi pada hari Senin, 2 Januari 2006 antara pukul 17.00 s/d 24.00 WIB. Setelah itu disusul turun hujan yang sangat lebat setiap hari selama tiga hari. (www.menlh.go.id). Dengan demikian kondisi korban sangat berat karena di saat harus menyelamatkan diri juga harus berhadapan cuaca yang sangat buruk.

Lokasi kejadian banjir di desa Kemiri 30 km dari kota Jember di kawasan yang boleh dibilang paling hulu, sekitar 1500-an meter di atas permukaan laut. Sungai yang banjir hampir tidak tercatat di peta (Pristiyanto, 2006). Lokasinya berada di kaki Gunung Argopuro yang merupakan daerah perkebunan dan pabrik kopi milik perusahaan swasta dan Perusahaan Daerah Perkebunan milik Pemerintah Kabupaten Jember. Untuk menjangkau lokasi membutuhkan waktu kurang lebih dua jam dan jalan menuju kesana sulit dilalui.

Endapan lumpur lebih dari satu meter menutup rumah-rumah penduduk di kawasan Dusun Sondong, Dusun Delima dan Dusun Gunungpasang, Desa Kemiri Kecamatan Panti sebagai daerah terparah. Di Desa Suci Kecamatan Panti jembatan penghubung terputus dan jalan tertutup endapan lumpur mencapai setinggi satu meter. Di samping itu, genangan banjir dan lumpur juga melanda ribuan rumah penduduk di sejumlah desa di Kecamatan Tanggul, Kecamatan Bangalsari dan Kecamatan Sukorambi, yang berada di sekitar Kecamatan Panti (www.suarapembaharuan.com).

Selengkapnya data kerusakan akibat banjir bandang adalah sebagai berikut (diolah dari Peduli Bencana Jember): di Desa Kemiri: Dusun Keputren 70% dari sekitar 300-an rumah rusak, Dusun Kalimanggis 80% dari sekitar 400-an rumah rusak, Dusun Delima belasan rumah diterjang sempadan sungai, jembatan putus dan hilang; pasar bangunan lenyap serta di Dusun Bunut 20 rumah rusak, pasar hancur. Sedangkan di Desa Suci: Dusun Kepiring: jembatan putus dan hilang, belasan rumah hancur.

Penanganan terhadap Korban Bencana

Sampai hari ketiga Rabu, 4 Januari 2006 pukul 18.00 WIB hari yang berhasil di evakuasi baru 11 orang. Memasuki hari ke-4 evakuasi sudah mulai lancar dilakukan, dusun-dusun terisolir mulai bisa dijangkau. Kamis, 5 Januari 2006 pukul 18.00 WIB dari Posko Satkorlak Kostrad di desa Kemiri dilaporkan adanya 87 korban meninggal dunia (www.menlh.go.id).

Jumlah pengungsi yang ditampung di gedung-gedung milik pemerintahan di Kecamatan Panti mencapai ribuan jiwa. Para pengungsi ini berasal dari dua desa yakni Desa Kemiri dan Desa Suci, yang merupakan daerah paling parah. Sementara itu sekitar 300-an orang tidak mau mengungsi yakni di Dusun Sondong dan Delimo, Desa Suci meski daerahnya telah terisolir karena jembatan penghubung terputus dan jalan yang tertutup endapan lumpur mencapai setinggi satu meter (www.suarapembaharuan.com).

Selengkapnya berdasar informasi dari Pemda Jember On-line korban dan penanganan terhadapnya adalah sebagai berikut:

- Jumlah korban manusia meninggal: 107 orang, ratusan orang belum diketemukan, sekitar 7000 warga mengungsi di 14 titik penampungan.
- Kerusakan harta benda meliputi 459 rumah dan gedung sekolah tergenang lumpur sedalam 0,5 - 1m, 4 jembatan desa terputus, ruas jalan dari Jember ke Surabaya tertutup lumpur, saluran air bersih rusak, kurang lebih 1000 ha sawah terendam air bercampur lumpur.

Penanganan di tenda-tenda pengungsian cukup memadai, para pengungsi tidak lagi kesulitan memperoleh penerangan di malam hari, minuman dan makanan bersih, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lain, seperti susu, alat komunikasi dan lain-lain. Yang sangat memprihatinkan adalah para korban bencana yang tidak mau mengungsi dengan alasan takut kehilangan harta benda yang ditinggalkan; orang-orang seperti ini hidup dalam suasana mencekam apalagi saat malam hari yang gelap disertai hujan, makanan dan minuman ala kadarnya. Meskipun pada dasarnya mengungsi bukanlah sesuatu yang diinginkan, tetapi mengungsi setidaknya jalan terbaik untuk menghindari bencana yang lebih besar (Jawa Pos, Kamis 5 Januari 2006, p.1,15).

Penyebab Banjir dan Tanah Longsor

Banjir disertai tanah longsor di bagian hulu sungai merupakan peristiwa yang cukup mengagetkan. Bagaimana tidak, justru hulu sungai itulah sumber mata air yang selanjutnya akan mengalir airnya melalui sungai-sungai sampai ke hilir di tepi laut. Lingkungan hulu sungai setidaknya harus merupakan lingkungan yang terjaga karena di samping sebagai sumber mata air, juga apa yang terjadi tentunya sangat berdampak besar pada daerah aliran sungai (DAS) yang di bawahnya.

Inilah yang terjadi di Jember, banjir dan tanah longsor terjadi di daerah hulu sungai sehingga memakan banyak korban. Rupa-rupanya daerah hulu sungai di sini bukanlah lingkungan yang terjaga kemurnian ekosistemnya, melainkan telah menjadi

areal perkebunan dan tempat perkampungan penduduk. Di wilayah ini memang merupakan wilayah perkebunan semenjak masa Belanda, dengan sejumlah jenis tanaman Karet, Kopi dan Kakao. Perkebunan ini sudah tidak dikelola PT Perkebunan, melainkan telah di HGU-kan (Hak Guna Usaha), antara lain dipegang oleh: Prinkopad 5 perkebunan Kopi dan Kakao di wilayah Gunung Pasang, PT JA Wattie perkebunan Kopi dan Kakao di wilayah Keputren, PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) perkebunan Kakao di wilayah Genthong.

Menurut data dalam website Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sejak tahun 1960-an terjadi penebangan hutan di sekitar wilayah perkebunan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Tentu hal ini sangat mengurangi jumlah dan kualitas hutan yang tersisa di wilayah tersebut. Terlebih lagi pada lima tahun terakhir (1999-2005) terjadi penebangan hutan secara lebih intensif untuk di alih fungsikan menjadi kebun Kopi. Menurut teori Ekologi Zona Kehidupan (*Life-Zone Ecology*) ketidakcocokan penggunaan wilayah dan jenis tanaman, menanam jenis tanaman yang sebenarnya tidak cocok dengan keadaan lingkungan tertentu dapat menimbulkan petaka yang berbahaya bagi manusia (Soeriatmadja, 1997).

Salah satu aspek cukup penting namun luput dari perhatian adalah masalah *warter culture* (kultur air). Kultur air adalah sejauhmana kepeahaman masyarakat tentang masalah pemanfaatan air dan konservasi air yang ada dilingkungannya. Tanpa upaya membudayakan kesadaran seluruh masyarakat bahwa air merupakan hal yang perlu dilindungi dan dijaga dengan metode-metode yang dikuasai masyarakat, maka upaya apapun tidak mampu menyelamatkan air dan seluruh komponen lingkungan yang terkait, termasuk manusia sendiri akan terancam keselamatannya oleh ketidakstabilan lingkungan (Maryono, 2005).

Sektor perkebunan bagi masyarakat Jember merupakan komoditi ekspor yang sangat menjanjikan, bahkan menyumbang 50% lebih pendapatan kotor daerah. Tidak mustahil hal ini munculnya kecenderungan untuk memperkebunkan hutan tanpa mengindahkan kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan diterima. Pemimpin Kebun PT JA Wattie, Gobang Supto Aji, kepada *Suara Pembaruan* (3 januari 2006)

menyatakan kerugian yang dideritanya akibat banjir dan tanah longsor setidaknya: rusaknya emplasemen pabrik seluas satu hektare, 20 hektare lahan tanaman kopi, 80 ton kopi jenis Robusta yang sudah diproses dan siap ekspor ke Eropa, rusaknya perumahan karyawan dan sebagian pabrik dengan kerugian mencapai 2 milyar rupiah.

Melihat keadaan di lapangan yang seperti ini, dapat disimpulkan, alih fungsi lahan yang terjadi di aeral ini telah menyebabkan hilangnya kohesitas tanah, sehingga tidak terkontrolnya tidak terkontrolnya air serapan dan air larian , yang kemudian dengan intensitas tertentu menyebabkan beberapa lereng tanah pegunungan tersebut longsor. Sampai penelitian ini dilakukan masih melihat beberapa bekas lereng perbukitan yang longsor di beberapa titik. Setelah peristiwa banjir dan tanah longsor, di Gunung Pasang terbentuk pula rekahan tanah selebar 1,5 m sepanjang sekitar 400 m yang berpotensi melongsorkan lereng perbukitan.

Dengan kata lain banyaknya korban bukan semata karena jumlah volume air hulu sungai, melainkan disebabkan oleh tertimbun lumpur bercampur bebatuannya, yang merupakan akibat longsornya beberapa lereng perbukitan. Air bercampur lumpur ini tidaknya hanya memakan korban jiwa dan hancurnya rumah-rumah, melainkan juga menyebabkan putusnya banyak jembatan, tergenangnya areal persawahan, serta terganggunya sarana jalan bahkan sampai ke wilayah di sekitar Kecamatan Panti.

Kesulitan Dalam Masa Tanggap Darurat

Menurut website Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, di sebutkan bahwa korban sebagian besar adalah penduduk yang banyak tinggal di wilayah bantaran sungai, yang secara topografi tidak layak untuk tempat tinggal karena kemiringan lereng mencapai 30 - 45 %, dengan bahan induk abu vulkan. Anehnya selama sebelum terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, masyarakat tidak mengira akan bencana yang akan menimpanya. Dalam pandangan mereka, selama bertahun-tahun hidup di wilayah itu tidak terjadi apa-apa.

Sisa keyakinan tersebut juga masih dijumpai peneliti saat wawancara dengan seorang informan penduduk bahwa katanya bencana ini cukup sekali dan tidak mungkin akan terjadi lagi. Keyakinan-keyakinan ini tentu dari segi kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tidak produktif, masyarakat kehilangan kewaspadaan dan cara-cara mengurangi resiko bencana. Pendapat informan tersebut memang tidak mungkin mewakili seluruh masyarakat di lokasi bencana, tetapi cukup mengherankan dengan musibah yang dialami, mereka belum begitu beranjak untuk memetik hikmah yang lebih baik di masa selanjutnya. Bahkan lebih anehnya lagi, pada masa-masa bencana masih berlangsung, sekitar tanggal 8 Januari 2006, sejumlah relawan dari PPLH (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) Seloliman Mojokerto menemukan sejumlah oknum melakukan penebangan hutan di kawasan perkebunan dusun Glengseran, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Hal ini tentu luar biasa, karena tidak terdapat empati sedikitpun atas peristiwa bencana yang telah menelan banyak korban jiwa tersebut.

Ketidaksiapan masyarakat menghadapi bencana menyebabkan jumlah korban yang banyak menjadi tidak terhindarkan. Mereka tidak memiliki sistem peringatan dini dan bagaimana cara evakuasi diri secara efektif. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri dan keluarga sehingga menjadi korban hanyut terbawa derasnya air bercampur lumpur dan bebatuan. Tercatat 107 korban jiwa, dan ratusan belum diketemukan.

Di dalam masa tanggap darurat (penanganan korban bencana) menyisakan sejumlah persoalan: dari simpang siurnya pendistribusian bantuan logistik dan obat-obatan untuk pengungsi sampai ramainya 'wisatawan bencana'. Menurut Tim PPLH Seloliman, ditemukan indikasi banyak warga yang tidak tertimpa bencana memanfaatkan untuk mengambil logistik yang tersedia di posko bencana.

Peristiwa banjir dan tanah longsor awal Januari 2006 di Jember ini mengawali bencana di Jawa, sebelumnya memang terjadi hal serupa di wilayah Sumatera. Sesudah itu bencana serupa beruntun terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai peristiwa yang menggemparkan pada saat itu, muncul kesan adanya respon

berlebihan dan politis sejumlah tokoh Jakarta. Sejumlah tokoh dari Jakarta berbondong-bondong ke lokasi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya itu banyak pula masyarakat yang ‘berwisata’ sekedar datang untuk melihat bencana.

Masa tanggap darurat atau penanganan terhadap korban bencana menjadi sedikit tersendat karena gangguan-gangguan persoalan di luar evakuasi dan pertolongan korban, yakni ramainya pengunjung luar, di samping terkendala cuaca serta medan yang berat. Pada akhirnya penanganan bencana dapat dikatakan berhasil meski masih terdapat kelemahan. Penanganan bencana dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan Satlak Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember di bantu sejumlah anggota dan peralatan militer, juga bantuan dari masyarakat dan LSM / organisasi non pemerintah seperti: Tim SAR OPA Jember, RAUNG 4X4, dan lain-lain.

Strategi Adaptasi Masyarakat Pasca bencana Banjir dan Tanah Longsor

Dalam siklus manajemen penanggulangan bencana terdapat proses: bencana (peristiwanya) – *emergency* (tanggap darurat) – *recovery* (pemulihan) – *mitigation* (pengurangan resiko bencana) – *preparedness* (kesiapsiagaan terhadap bencana). Strategi adaptasi masyarakat adalah bagaimana upaya pemulihan dan sekaligus mitigasi serta kesiapsiagaan yang di bangun masyarakat korban bencana. Masyarakat telah bangkit kembali untuk menjalani aktivitas hidup dengan segala kemungkinan bahaya yang mungkin saja dapat terulang kembali:

a. Pembangunan Perumahan bagi Korban Bencana

Secara umum setiap masyarakat korban bencana banjir tidak mengalami permasalahan tentang tempat hunian / rumah kembali. Masyarakat korban bencana berada di tenda pengungsian selama kurang lebih enam bulan, terutama bagi yang rumahnya rusak berat dan tidak dapat dihuni kembali. Setelah itu, masyarakat sudah dapat menempati lokasi perumahan-perumahan yang telah di bangun dilengkapi

dengan sejumlah peralatan rumah tangga. Perumahan bagi korban bencana banjir antara lain di bangun di dusun Gunung Pasang, Delima, Krajan dan Gaplek.

Rata-rata rumah yang di bangun berukuran lebar 5 m, kebelakang 6 m dan tinggi 3 m; atau kira-kira setara dengan ukuran 30 m², di atas luas tanah 6m x 8m. Setiap dua rumah gandeng dengan satu dinding, dan kemudian setiap rumah $\frac{3}{4}$ dikitari dengan sisa tanah sekitar 1 m yang biasanya diberi tanaman hias sehingga terlihat asri. Bahan dasar rumah adalah campuran antara batako dengan triplek, lantai semen, dinding setinggi 1m berupa batako, sisanya ke atas adalah rangka kayu dan bedinding triplek, memiliki satu pintu depan, 3 jendela kaca, dan sedikit teras rumah. Genteng berbahan asbes.

Perumahan-perumahan bagi korban pengungsi yang di bangun di beberapa titik lokasi di desa Suci dan Kemiri, memiliki bentuk dan model yang seragam sebagaimana telah diuraikan. Perumahan di bangun atas bantuan dari perkumpulan Orang-orang Tionghoa alumni Sekolah SR-SMP CHUNG HWA di Jember baik di Indonesia ataupun luar negeri, Group PANIN, Depstore MATAHARI, dan bekerjasama dengan Pemkab Jember, TNI dan Polri.

Perumahan-perumahan di bangun mengambil lokasi di tempat yang datar sehingga dalam satu areal bisa menampung cukup banyak rumah. Rumah-rumah di bangun teratur layaknya perumahan dengan jalan-jalan gang selebar 2,5 m, dengan saluran air mini di samping kiri-kanan jalan atau masing-masing depan dan belakang rumah. Fasilitas tempat ibadah seperti Mushola (Masjid kecil) juga di sediakan.

Dari hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan persoalan recovery fisik menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, terjadi rata-rata jarak rumah dengan sungai yang semakin jauh yakni: semula rata-rata jarak rumah dengan sungai hanya sekitar 57 m, setelah bencana terjadi rata-rata jarak rumah dengan sungai 157 m, berarti terjadi penambahan rata-rata 100 m jarak rumah dengan sungai, yang berarti pula semakin memperkecil/ mengurangi resiko akibat bencana jika bencana banjir muncul kembali.

Persoalan yang muncul adalah padatnya perumahan dan kualitas bangunan yang semi permanen. Lokasinya cukup mengandung masalah, karena kebanyakan perumahan dijauhkan dari DAS (Daerah Aliran Sungai), namun justru berarti mendekatkannya dengan lereng-lereng perbukitan yang rawan longsor. Topografi tanah perbukitan rata-rata dengan kemiringan 20 sampai 50 derajat, sehingga memang cukup sulit untuk mencari lokasi yang ideal.

Persoalan lain yang ditemukan tim peneliti antara lain adalah bahwa rumah yang di tempati korban bencana berstatus milik pemerintah yang sewaktu-waktu ijin sewa dan peruntukannya bisa di cabut. Setiap korban harus memperbaharui ijin sewanya setiap setahun sekali.

b. Strategi Sosial: Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Rata-rata korban bencana belum dapat hidup pulih sepenuhnya, masih merasakan kepedihan akibat kehilangan nyawa beberapa anggota keluarganya serta hilangnya harta dan rumah mereka. Hasil survei menunjukkan 96,3 % responden memiliki keinginan-keinginan minimalnya kembali seperti keadaan dulu sebelum terjadinya bencana, jadi masih banya hal yang belum terwujud. Walaupun sebenarnya 96,3 % pula telah kembali ke pekerjaan semula.

Dari hasil interview menunjukkan bahwa responden tidak memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, bahkan hampir 100 % responden tidak menduga akan terjadinya banjir disertai tanah longsor. Menurut masyarakat setiap tahun memang terjadi hujan lebat di sertai banjir, namun paling-paling hanya bersifat sebentar (karena sifat lokasi di hulu sungai sehingga air cepat surut). Akibat ketidaksiapsiagaan menghadapi bencana maka pada saat bencana terjadi mereka tidak memiliki sistem evakuasi yang memadai.

Kesiapsiagaan mulai muncul setidaknya setelah trauma atas peristiwa bencana tersebut. Sebanyak 44, 4 % menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti tentang kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan yang utama pada umumnya dalam bentuk: mengemas barang-barang agar mudah di bawa dan keluar rumah (berada di teras rumah atau kumpul dengan tetangga) pada saat mulai mendung gelap dan hujan lebat.

Dari segi kelangsungan ekonomi dan usaha, sebagian besar telah kembali ke pekerjaan semula. Klasifikasi pekerjaan responden berdasarkan hasil survei adalah: Karyawan Perkebunan 37 %, Berdagang 40 %, Bertani 4 %, Wiraswasta 8 %, sisanya profesi yang lain.

Penghasilan responden rata-rata per bulan adalah Rp.461.000,00, dengan jumlah anak rata-rata 7 anak untuk tiap 2 keluarga. Hal ini cukup membebani setiap rumah tangga. Peneliti terkadang juga menemukan beberapa responden yang sebetulnya memiliki sawah namun enggan menyebut dirinya sebagai petani, di samping kebun sayuran yang biasanya juga sudah lazim di iklim pedesaan pegunungan. Sawah-sawah yang tadinya terendam lumpur dan bebatuan juga sudah dapat ditanami kembali, sehingga setidaknya terdapat stok pangan untuk wilayah itu.

Perlunya Peningkatan Strategi Adaptasi Masyarakat Korban Bencana

Rata-rata masyarakat tidak memiliki persiapan yang cukup menghadapi bencana. Pandangan dan sikap terhadap bencana masih harus diperbaiki, Tuhan memberi cobaan berupa ‘bencana‘ bukan untuk dibiarkan, atau pasrah terhadapnya, melainkan semua adalah pelajaran yang harus dipetik hikmahnya. Dalam pandangan Islam sangat jelas bahwa: “Allah swt tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang juga ikut mengusahakannya”.

Rupa-rupanya pola pemikiran yang tidak ruwet, alih-alih ciri masyarakat tradisional, yang lebih memilih menyederhanakan masalah: bahwa semua kejadian sudah merupakan takdir; dapat merupakan pengabaian terhadap tanggungjawab yang seharusnya di emban oleh setiap orang. Dalam bahasa tertentu, meletakkan hidup diatas ancaman bahaya bencana tanpa usaha untuk mengantisipasinya bisa dikategorikan bunuh diri. Padahal tindakan seperti itu tidaklah dikehendaki dalam sikap etik dan norma-norma agama.

Dalam persoalan pembuatan rumah pascabencana, karena kelemahannya, masyarakat korban bencana tidak punya pilihan lain selain menerima yang telah disediakan. Masyarakat tidak memiliki pilihan serta kemampuan untuk membangun

kembali rumah dan lingkungannya yang telah hancur. Padahal, rumah-rumah di perumahan yang di bangun bagi korban bencana tersebut menurut peneliti, meskipun agak terhindar dari ancaman bencana banjir, tetapi di sisi lain dihadapkan pada ancaman bencana baru yang tak kalah berbahayanya yakni tanah / perbukitan yang longsor. Ancaman akan tanah longsor semakin nyata dengan munculnya rekahan pada lereng perbukitan di belakang perumahan seperti yang dijumpai di sekitar Gunung Pasang.

Dengan demikian dari aspek kemasyarakatan, korban bencana tergolong lemah dalam persiapan dan kesiapsiagaan baik pada saat maupun pasca bencana. Hal ini bukan semata-mata kesalahan masyarakat, karena bagaimana pun pemerintah juga memiliki tanggungjawab untuk mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Banyaknya bantuan yang juga mengalir kepada korban bencana di Jember harus disertai dengan transparansi pengelolaan oleh pemerintah, sehingga tidak memunculkan sikap saling curiga dan ketidakpercayaan antara masyarakat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Kesimpulan

Masyarakat korban bencana banjir dan tanah longsor Jember awal Januari 2006 secara umum sudah dapat tertangani dengan baik. Sebagai hasil atas kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan sejumlah donatur, maka semua korban bencana telah menempati rumah-rumah bantuan. Dengan demikian korban bencana menempati tenda pengungsian hanya dalam waktu sekitar enam bulan.

Rumah-rumah bantuan bersifat semi permanen dan berukuran sederhana. Sarana dan prasarana seperti jalan, air, penerangan dan tempat ibadah cukup memadai. Terletak cukup menjauh dari daerah aliran sungai, namun mendekat ke arah lereng perbukitan. Rasa traumatik dan tak berdaya masih menyelimuti masyarakat korban bencana: pada saat-saat hujan turun warga berada di luar rumah atau berkumpul bersama tetangga.

Penanganan korban bencana adalah persoalan kemanusiaan, bukan semata hanya persoalan fisik. Perlu diatur secara jelas dan terencana tahap-tahap pemberdayaan kembali masyarakat korban bencana. Pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak boleh melepas masyarakat begitu saja. Sampai masyarakat betul-betul tegar dan pulih baik secara fisik maupun sosial, barulah dapat dilepaskan perhatian dan pendampingan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait. Selama hal itu belum tampak, maka pemerintah dan pihak-pihak terkait masih harus bertanggungjawab melakukan pendampingan pada masyarakat korban bencana.

Daftar Pustaka

- Maryono, Agus, 2005, *Menangani Banjir, Kekeringan dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pristiyanto, Djuni, 2006, *Sebaran Data Kerusakan Banjir Bandang Jember*, Moderator Milis Lingkungan, Milis WGCoP, Jakarta.
- Soeriaatmadja, R.E, 1997, *Ilmu Lingkungan*, Penerbit ITB, Bandung.

Surat Kabar: Jawa Pos 5 Januari 2006
Suara Pembaruan, 3 Januari 2006

Internet: www.menlh.go.id
www.suarapembaharuan.com
www.PedulibencanaJember.com